



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
UNIT KERJA : PERWAKILAN RI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FEBRIAN ALPHYANTO RUDDYARD
2. Jabatan : WAKIL TETAP RI JENEWA
3. NHK : 245964

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.503.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000.000
2. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 969 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.003.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 244.859.131

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MICRO/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA REBEL/CMX500 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 104.859.131

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 170.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.457.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 7.375.759.131

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.375.759.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.